

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017**

**Feni Febriayanti**

(fenifebriana123@gmail.com)

**Muhammad Faris**

(faris67@gmail.com)

**Jurusan Akuntansi Universitas Islam Lamongan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi, dengan jumlah sampel 38 Kabupaten/Kota setiap tahunnya dari tahun 2015-2017. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

***Kata Kunci : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah***

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine the significant impact of Local Taxes and Retribution in regency/ city at East Java Province in 2015-2017. The analytical method used is a quantitative method. The data which have already collected are processed with classic assumption test before hypothesis test. Hypothesis test in this research use double regression with t test, F test and coefficient determination test, with total sample of 38 regency/city every year from 2015-2017. Finally, it can be concluded simultaneously Local Tax and Retribution have a positive significant impact to the regional financial independence. Variables Local Taxes and Retribution only has a contribution of 77,3% of the Regional Financial Independence variable, while the remaining*

*22,7% was contributed by other variables that are not observed in this study.*

***Keywords : Regional Financial Independence, Local Tax, Retribution***

## **A. LATAR BELAKANG**

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian.

Kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Sunarto dan Sunyoto (2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Kemandirian daerah dan juga dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil campur tangan pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Sesuai asas *money follows function* penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud makacita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan (Haryanto, 2014:7).

Nggilu, et al. (2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal. Namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsure pendapatan asli daerah yang utama.

Haerunnisa (2018) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bias menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Saprudin (2018) di Kabupaten Gorontalo, Kemampuan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Begitu pula penelitian Sunarto dan Sunyoto (2016) yang mengemukakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak diantara 111<sup>00</sup> Bujur Timur – 114<sup>0</sup> Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> 12 Lintang Selatan - 8<sup>048</sup> Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup>. Secara administrative Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat karena pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang bias menjadi tolak ukur kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017?

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** :Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

**H<sub>2</sub>** :Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

**H<sub>3</sub>** :Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pajak Daerah**

Mardiasmo (2013) Menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:102) Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Sedangkan menurut Darwin (2010: 165) "Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang atau badan".

Siahaan (2013:5) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi Daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **3. Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2013:5) Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri dalam kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

## **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomis asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk

modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Halim dan Kusufi, 2012: 101).

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil peneliti adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012:13) mengemukakan penelitian kuantitatif, sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat). Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:90)

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017, yaitu sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota, sehingga jumlahnya 38 dikali 3 tahun = 114 amatan, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampel yang dapat digunakan dan karakteristik dari sampel juga sangat beragam. Oleh karena itu, pengambilan sampel tidak bias dilakukan dengan sembarangan dan hanya menghitung dari persentase populasi (Sugiyono, 2014:91).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu "teknik penentuan sampel karena memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

b. Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan Realisasi APBDnya selama periode 2015-2017.

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur periode 2015-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan situs ([www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id)).

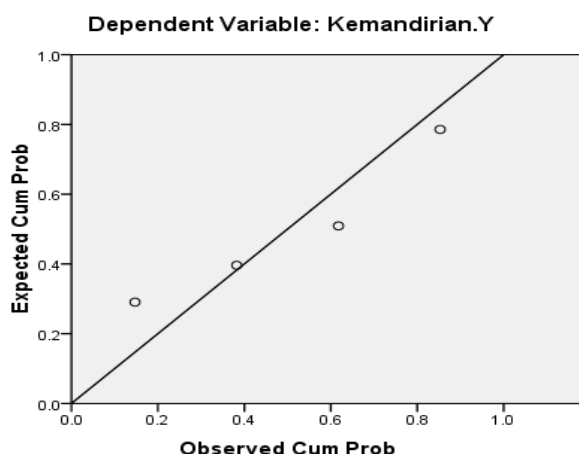
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Bahan-bahan dari sumber sekunder dapat dipandang sebagai data yang dikumpulkan sendiri dan karena itu harus diperlakukan dan pengolahan yang sama (S. Nasution, 2009:143).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi (Sugiono, 2012). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Asumsi Klasik

**Gambar 1: Grafik Uji Normalitas**  
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



*Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

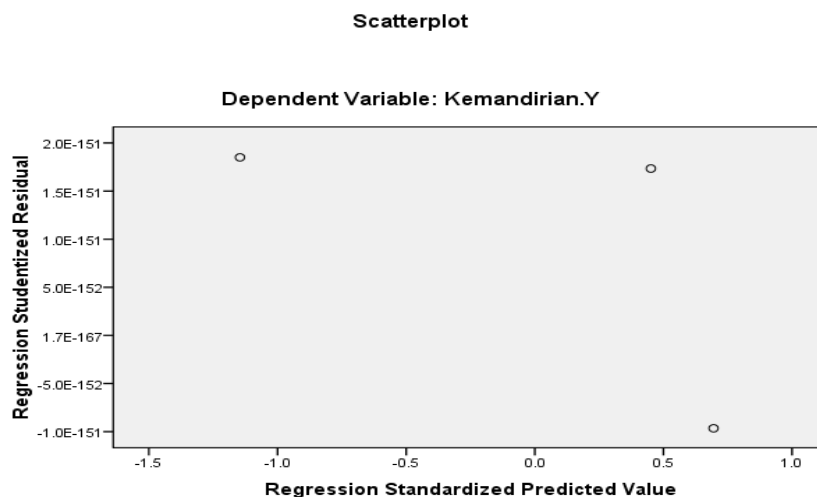
**Tabel 1: Uji Multikolinearitas**  
Tabel1. hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
0.775	1.002
0.775	1.002

Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019

Dari tabel di atas menunjukkan variabel tidak mempunyai masalah multikolinearitas dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10.

**Gambar 2: Grafik Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019

Dari gambar di atas menunjukkan Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

**Tabel 2: Uji Autokorelasi**  
Tabel2. hasil Uji Autokerlasi

Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.221476	1.151

Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019



Dari tabel di atas di ketahui bahwa nilai D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

**Tabel 3: Uji Regresi Linier Berganda**

Tabel3. hasil Uji Linier Berganda

Unstandardized Coefficients	
B	Std. Error
1.1708	7919.536
0.013	0.001
0.007	0.001

*Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019*

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis regresi berganda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, maka dapat disajikan persamaan regresi yakni sebagai berikut :

$$Y = 1.1708 + 0.013 X_1 + 0.007 X_2$$

Ket : Y = Kemandirian Keuangan Daerah

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

a = 1.1708 merupakan nilai konstant, dengan kata lain jika Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) dan Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) tidak berubah maka nilai Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 1.1708,-

b<sub>1</sub>X<sub>1</sub> = 0.013 yang artinya apabila Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) naik sebesar .1, maka pengaruhnya atas Kemandirian Keuangan Daerah (Y) akan naik sebesar 0.013 apabila Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) dalam keadaan konstan.

b<sub>2</sub>X<sub>2</sub> = 0.007 yang artinya apabila Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) naik sebesar 1, maka pengaruhnya atas Kemandirian Keuangan Daerah (Y) akan naik sebesar 0.007 apabila Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) dalam keadaan konstan.

**Tabel 4: Uji Adjusted R Square**

R Square	Adjusted R Square
0.773	0.766

*Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019*

Dari tabel hasil uji Adjusted R Square dengan SPSS yang dipaparkan di atas kita dapat mengetahui bahwa hasil nilai R Square =

0,773. itu artinya bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar 77,3%. Sedangkan sisanya yang 22,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lainya.

**Tabel 5: Uji Hipotesis (Uji t)**

model	t	Sig.
Constant	14.772	0.005
Pajak X <sub>1</sub>	19.668	0.003
Retribusi X <sub>2</sub>	5.158	0.036

*Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah 2019*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) dengan besar nilai t = 19.668 variabel kedua yang paling dominan adalah variabel Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) dengan besar nilai t = 5.158.

Kemudian untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh tiap-tiap variabel bebas Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) dan Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Uji t hitung X<sub>1</sub> = Pajak Daerah. Jika t hitung > t tabel = Ho ditolak (signifikan). t hitung < t tabel = Ho diterima ( tidaksignifikan). Level signifikan = 95%,  $\alpha = 0,05$ . Derajat kebebasan (df)  $n - k - 1$ . t hitung 19.668 > t tabel 2,571.

Pengaruh Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan Ho ditolak (berpengaruh secara signifikan).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Susianti, *et al.* (2017) Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

- 2) Uji t hitung  $X_2 =$  Retribusi Daerah. Jika t hitung  $<$  t tabel =  $H_0$  diterima (tidakberpengaruhsignifikan). t hitung  $>$  t tabel =  $H_0$  ditolak (berpengaruhsignifikan). Level signifikan =95%,  $\alpha = 0,05$ . Derajat kebebasan (df)  $n - k -1$ . t hitung 5.158  $>$  t tabel 2,571. Pengaruh Retribusi Daerah ( $X_2$ ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak (berpengaruh secara signifikan).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nggilu, *et al.* (2016) Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

**Tabel 6: hasil Uji F**

model	F	Sig.
Regression	21.847	0.005 <sup>a</sup>
Residual		
Total		

*Sumber : Output Statistik SPSS 24 yang diolah*

Dari tabel di atas hasil uji F dengan SPSS yang dipaparkan di atas kita dapat mengetahui bahwa hasil nilai F hitung sebesar 21.847. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  =  $H_0$  ditolak (signifikan). Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  =  $H_0$  diterima (tidak signifikan). Level signifikan = 95%,  $\alpha = 0,05$ .  $F_{hitung} 21.847 > F_{tabel} 5,79$ .

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) dengan dilakukan pengujiannya dilakukan secara bersama-sama (simultan). dengan tingkat kepercayaan 95 % disimpulkan  $H_0$  ditolak (berpengaruh secara signifikan).

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, *et al* (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah serta penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa membuat Pemerintah Daerah tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam mengelola Keuangan Daerah.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan dari besarnya nilai  $t$  hitung 19.668 >  $t$  tabel 2,571. Dengan prosentase sebesar 52% dari total pendapatan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah (Susianti, *et al.* 2017).
2. Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Hal ini ditunjukkan dari besarnya nilai  $t$  hitung 5.158 >  $t$  tabel 2,571. Dengan prosentase sebesar 1% dari total pendapatan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Nggilu, *et al.* 2016).
3. Hasil yang diperoleh untuk uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah ( $X_1$ ) dan Retribusi Daerah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Hal ini dapat ditunjukkan dari besarnya nilai  $F$  hitung 21.847 >  $F$  tabel = 5,79.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran.

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih menambah kabupaten/kota yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain menambah sampel, penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Timur. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Timur.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih banyak menggunakan variabel independen dalam penelitian.
3. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut, dengan tetap memperhatikan pengembangan Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2019, [www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id).
- Darize, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haerunnisa. (2018) “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar”. *Jurnal Akuntansi*. 4 (2), hlm 44-55.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Edisi ke 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim dan Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto. 2014. “Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis”. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol 9.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tiwaroh, V. (2016). “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (4), hlm 623-635.
- Novalistia, L. R. (2016) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Akuntansi*. 2 (2), hlm 11-35.
- Saprudin. (2018) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo”. *Jurnal Akuntansi*. 1 (1) hlm 47-58.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunarto & Sunyoto, T. (2016) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Dan kota di Jawa Tengah)”. *Dharma Ekonomi*. 13 (43) hlm 13-22.
- Susianti, D., Murhabban., & Zulkarnaini. (2017). “Pengaruh Kontribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah”. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*. 3 (1), hlm 15-28.
- Siahan, Marihot. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.